

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H.S, Salim. 2010. *Hukum Kontrak*. Cetakan ke sepuluh. Sinar Grafika. Jakarta.
- H.S. Salim. 2008. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika. Jakarta.
- H.R, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- H.S, Salim. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1998. *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Admnistrasi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Saragih, Djasadin . 1985. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Surabaya.
- Manan, Bagir dan Kuntara Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2003. *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*. Yuridika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Naja, H.R. Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Simamora, Yohanes Sogar. 2009. *Hukum Perjanjian Prinsip Umum Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.

Sjahdeini, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.

Soehardjo. 1991. *Hukum Administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.

Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Suryodiningrat, R.M. 1991. *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*. Tarsito. Bandung.

Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta. Bandung.

Triyanto, Djoko. 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Mandar Maju. Bandung.

Yahya, Marzuki. 2012. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai dengan Perpres*. Laskar Aksara. Jakarta Timur.

Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang E-Purchasing.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi.

C. Internet

<http://kamusbahasaIndonesia.org/perjanjian>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2014, Pukul 13.16

<http://artikel2.com>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2014 pukul 16.05.

<http://www.legalakses.com/perikatan-perjanjian-kontrak>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2014, pukul 20.38.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2015, pada pukul 12.04.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2015, pada pukul 12.50.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Addendum>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2015, pukul 15.3

<http://www.khalidmustafa.info/tag/perpres-42015>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2015, pada pukul 21.00.

<http://www.rahfanmokokinta.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 20.00.

D. Lain-lain

Poesoko, Herowati. 2008. *Diktat Mata kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada seminar nasional fakultas hukum Unpad. Bandung.